

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. KONDISI KOTA YOGYAKARTA

A.1 Kondisi Geografis

Kota Yogyakarta yang terletak antara $110^{\circ} 24'19''$ – $110^{\circ} 28'53''$ Bujur Timur dan antara $70^{\circ} 49'26''$ – $70^{\circ} 15'24''$ Lintang Selatan. Kota Yogyakarta terletak di daerah daratan lereng gunung Merapi dan berada pada ketinggian lahan yang relatif datar (antara 0 – 2 %) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 M dpa (dari permukaan air laut) sebagian besar jenis tanahnya regosol dengan formasi geologi batuan sedimen old andesit. Terdapat tiga (3) sungai yang mengalir dari utara ke selatan yaitu sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, sungai Code dan sungai Winongo di bagian barat kota.

A. 1.a. Batas Wilayah

Secara administrasi kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan dengan batas wilayah :

Sebelah Utara	: Kabupaten Sleman
Sebelah Selatan	: Kabupaten Bantul
Sebelah Timur	: Kabupaten Bantul dan Sleman
Sebelah Barat	: Kabupaten Bantul dan Sleman

A. 1.b. Luas Wilayah

Secara keseluruhan Kota Yogyakarta mempunyai luas sekitar 32,5 km² atau 1,02 % dari luas wilayah propinsi dari utara ke selatan kurang lebih 7,5 Km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,6 Km. Kota Yogyakarta di bagi ke dalam 14 Kecamatan serta 45 Kelurahan, hal ini sesuai dengan SK Mendagri No. 140-263 Tahun 1981 mengenai Pembentukan kelurahan-kelurahan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah dirinci menurut Kelurahan, Jumlah RW dan Jumlah RT Tahun 2004-2005

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Km ²	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Mantrijeron	1. Gedongkiwo	0,90	18	86
		2. Suryodiningratan	0,85	17	69
		3. Mantrijeron	0,86	20	75
2.	Kraton	1. Patehan	0,40	10	44
		2. Kraton	0,66	18	78
		3. Kadipaten	0,34	15	53
3.	Mergangsan	1. Brontokusuman	0,93	23	83
		2. keparakan	0,53	13	57
		3. wirogunan	0,85	24	76

4.	Umbulharjo	1. Giwangan	1,26	13	42
		2. Sorosutan	1,68	14	58
		3. Pandeyan	1,38	12	46
		4. Warungboto	0,83	9	38
		5. Tahunan	0,78	11	48
		6. Muja-Muju	1,53	12	55
		7. Semaki	0,66	10	34
5.	Kotagede	1. Prenggan	0,99	13	57
		2. Purbayan	0,83	14	58
		3. Rejowinangun	1,25	13	49
6.	Gondokusuman	1. Baciro	1,06	21	88
		2. Demangan	0,47	12	44
		3. Klitren	0,68	16	63
		4. Kotabaru	0,71	4	21
		5. Terban	0,80	12	59
7.	Danurejan	1. Suryatmajan	0,28	15	45
		2. Tegal Panggung	0,35	16	66
		3. Bausasran	0,47	12	49
8.	Pakualaman	1. Purwokinanti	0,33	10	47
		2. Gunung Ketur	0,30	9	36
9.	Gondomanan	1. Prawirodirjan	0,45	18	61
		2. Ngupasan	0,67	13	49
10.	Ngampilan	1. Notoprajan	0,37	8	50

		2. Ngampilan	0,45	13	70
11.	Wirobrajan	1. Patangpuluhan	0,44	10	51
		2. Wirobrajan	0,67	12	58
		3. Pakuncen	0,65	12	56
12.	Gedongtengen	1. Pringgokusuman	0,46	23	89
		2. Sosromenduran	0,50	14	55
13.	Jetis	1. Bumijo	0,58	13	55
		2. Gowongan	0,46	13	52
		3. Cokrodiningratan	0,66	11	60
14.	Tegalrejo	1. Tegalrejo	0,82	12	46
		2. Bener	0,57	7	20
		3. kricak	0,82	13	59
		4. Karangwaru	0,70	14	56
	Jumlah	45	32,50	610	2,513

Sumber Data : BPS Kota Yogyakarta

A.2 Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan di Kota Yogyakarta dibedakan menjadi 7 kategori berdasarkan fungsinya yaitu : 2,130 ha (2004) dan 3,438 ha (2005) untuk perumahan, sisanya perkantoran 117,78 ha (2004) dan 222,52 ha (2005), industri 29,67 ha (2004) dan 36,42 ha (2005), pertokoan 148,28 ha (2004) dan 139,26 ha (2005), sawah atau ladang 150 ha (2004) dan 148 ha (2005), bangunan umum 275 ha (2004) dan 277 ha (2005), dan

lain-lain 4,963 ha (2004) dan 194 ha (2005). Perinciannya tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Luas Penggunaan Tanah Berdasarkan Status Peruntukan
Lahan Tahun 2004-2005

No	Kec	JENIS PENGGUNAAN TANAH (HA)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	TR (2004)	156	13,14	2,51	15,5	4,3	37	35	249,45
	TR (2005)	156	13,14	2,51	15,5	4,3	37	35	249,45
2	JT (2004)	123	10,87	3,1	4,91	-	21	9	171,08
	JT (2005)	123	124,8 7	3,1	6	-	21	9	286,97
3	GK (2004)	303	17,45	2,66	35,4	-	50	6	414,51
	GK (2005)	303	12,63	2,96	36,21	-	50	10	414,8
4	DR (2004)	50	18,29	-	4,93	-	-	15	88,22
	DR (2005)	50	16,29	-	4,93	-	-	17	88,22
5	GT (2004)	50	2	0,50	12,4	-	41	-	105,9
	GT (2005)	50	2	0,50	12,4	-	41	-	105,9
6	NGP (2004)	42	1,36	0,69	0,57	-	23	-	67,62
	NGP (2005)	42	1,36	5,6	9,18	-	23	-	81,14
7	WB (2004)	88	0,82	3,15	9,57	-	17	11	129,54
	WB (2005)	43,417	0,82	3,15	9,57	-	17	11	84,957
8	MJ (2004)	184	2,43	0,48	4,14	8	9	19	227,05
	MJ (2005)	181	2,43	0,48	4,14	8	9	8	153,05
9	KR (2004)	82	7,5	2,02	1,77	-	-	12	105,29
	KR (2005)	82	7,5	2,02	1,77	-	-	12	105,29
10	GM (2004)	64	2,42	1,99	20,57	-	28	3	101,98
	GM (2005)	64	2,42	1,99	20,57	-	28	3	101,98
11	PA (2004)	49	0,52	-	6,23	-	-	11	66,75
	PA (2005)	49	1,61	-	6,23	-	15	6	77,84
12	MG (2004)	1	7,12	1,29	24	3	1	6,769	44,179
	MG (2005)	5	7,12	1,29	4,55	-	5	3	25,96
13	UH (2004)	561	24,58	8,9	5,12	78	22	9	708,6
	UH (2005)	560	24,58	8,9	5,12	78	26	64	766,6
14	KG (2004)	209	10,28	2,08	3,19	19	10	5	258,55
	KG (2005)	209	5,75	3,93	3,09	19	10	17	267,77
	JUMLAH (2004)	2,130	117,7	29,67	148,28	150	275	4,963	2738,719
	(2005)	3,438	8 222,5 2	36,42	139,26	148	277	194	2809,927

Sumber Data : Pemerintah Kota Yogyakarta (Bag. Tata Pemerintahan)

Keterangan :

- (1) = Perumahan
- (2) = Perkantoran
- (3) = Industri
- (4) = Pertokoan
- (5) = Sawah/Ladang
- (6) = Bangunan Umum
- (7) = Lain-lain
- (8) = Jumlah

Berdasarkan tabel dari luas penggunaan tanah berdasarkan status peruntukannya, jenis penggunaan tanah terbanyak pada tahun 2004 dipergunakan untuk lain-lain, lain-lain disini meliputi tanah yang tidak terpakai yang jumlahnya sekitar 4.963 Ha, sedangkan pada tahun 2005 penggunaan tanah atau pemanfaatan tanah terbanyak dipergunakan untuk perumahan yang jumlahnya sekitar 3.438 Ha. Sementara pemanfaatan tanah paling sedikit pada tahun 2004 dipergunakan untuk persawahan yaitu sekitar 150 Ha dan pada tahun 2005 penggunaan tanah paling sedikit adalah persawahan yaitu sekitar 148 Ha. Sementara bila dilihat secara keseluruhan penggunaan tanah terbanyak hingga paling sedikit dapat penulis uraikan sebagai berikut :

- Pada Tahun 2004 : Lain-lain (4.963 Ha), Perumahan (2.130 Ha), Pertokoan (148,281 Ha), Perkantoran (117,78 Ha), Industri

(29,67 Ha), Bangunan Umum (2.75 Ha), dan Persawahan (150 Ha).

- Pada Tahun 2005 : Perumahan (3.438 Ha), Perkantoran (222,52 Ha), Pertokoan (139.26 Ha), Perindustrian (36.42 Ha), Bangunan Umum (227 Ha), Lain-Lain (194 Ha) dan Persawahan (148 Ha).

A.3 Kondisi Demografis

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk di Kota Yogyakarta semakin bertambah. Kelahiran dan pendatang akan menambah jumlah penduduk sebaliknya kematian dan perpindahan akan mengurangi jumlah penduduk. Akan tetapi karena jumlah kelahiran dan pendatang lebih banyak dari pada kematian dan perpindahan maka jumlah penduduk semakin bertambah. Kota Yogyakarta memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel kepadatan penduduk per Kecamatan pada tahun 2004 dan 2005 berikut ini :

Tabel 2.3**Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2004-2005**

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa / Km 2)
		Tahun 2004
1.	Gedongtengen	56,397
2.	Gondomanan	33,226
3.	Mantrijeron	28,567
4.	Danurejan	28,360
5.	Ngampilan	28,279
6.	Pakualaman	23,564
7.	Jetis	22,176
8.	Kraton	21,354
9.	Gondokusuman	20,469
10.	Mergangsan	18,514
11.	Wirobrajan	17,706
12.	Tegalrejo	14,083
13.	Kotagede	10,170
14.	Umbulharjo	8,762

Sumber Data : BPS Kota Yogyakarta dan Monografi Kecamatan

Berdasarkan tabel dari kepadatan penduduk menurut per Kecamatan pada tahun 2004-2005, kepadatan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Gedongtengen yaitu sekitar 56.797 (Jiwa/Km²), sedangkan kepadatan terkecil berada di Kecamatan Umbulharjo yaitu sekitar 8.762 (Jiwa/Km²). Bila kita lebih teliti dan amati lebih lanjut kepadatan disetiap kecamatan dapat dipastikan setiap tahun ketahun akan mengalami peningkatan jumlah penduduk seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Kelahiran dan pendatang secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh kepadatan penduduk yang ada di Kota Yogyakarta.

Selain itu disini kami juga menyajikan data mengenai kepadatan penduduk menurut jumlah rumah tangga dan jenis kelamin bersumber dari data tahun 2004-2005 seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga

Dan Jenis Kelamin Pada Tahun 2004-2005

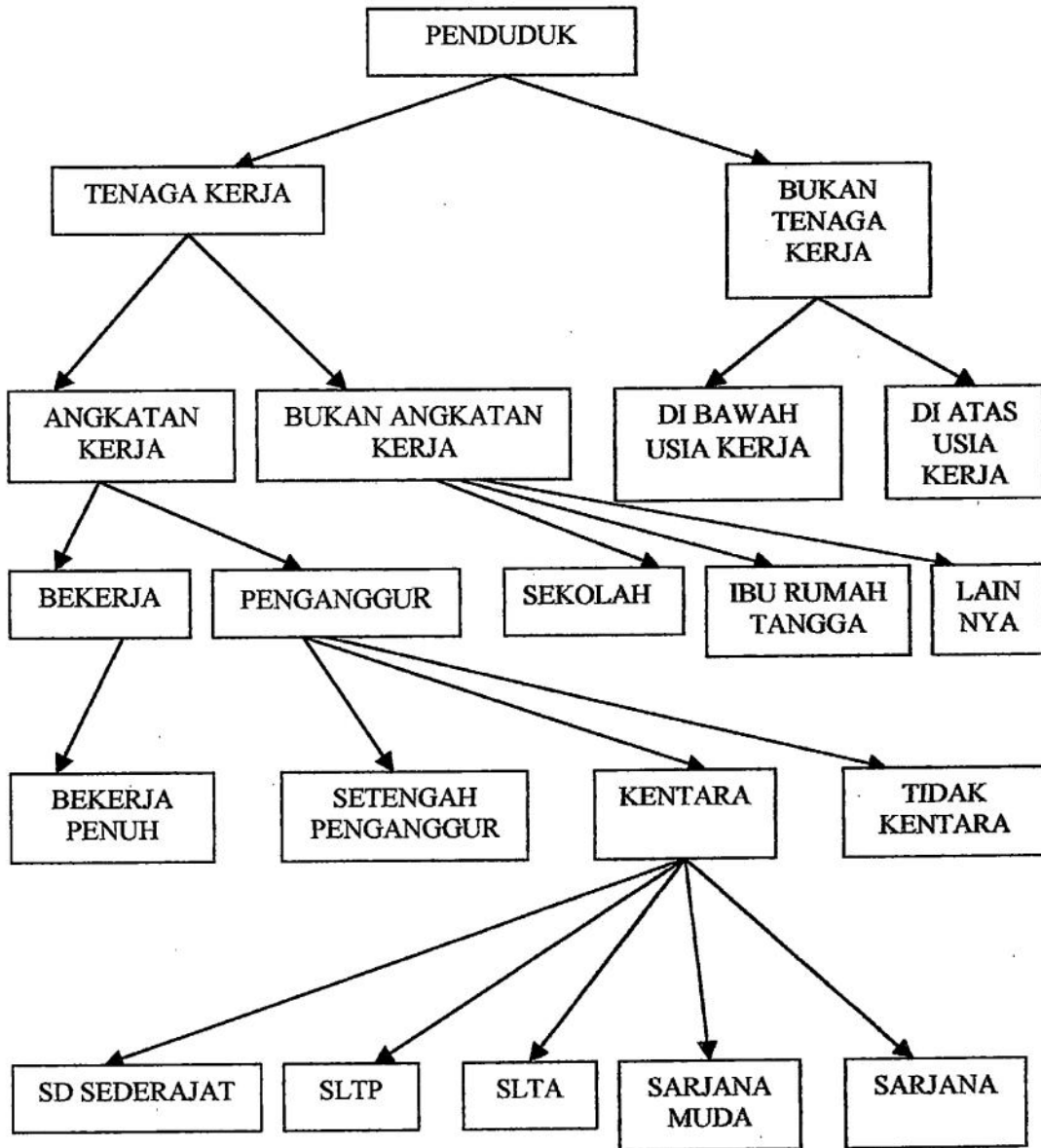
No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga		Jumlah Penduduk		Penduduk Menurut Jenis Kelamin			
						L		P	
		2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
1.	Mantrijeron	7,909	7,968	40,580	40,931	20,462	20,636	20,118	20,295
2.	Kraton	6,813	6,773	29,632	30,019	14,738	14,859	14,894	14,981
3.	Mergangsan	8,282	8,272	42,036	42,581	22,039	22,346	19,997	20,235
4.	Umbulharjo	16,277	16,639	72,033	73,746	37,207	38,147	34,826	35,599
5.	Kotagede	6,981	7,064	31,477	31,986	15,807	16,064	15,670	15,922
6.	Gd kusuman	13,316	13,429	74,979	75,550	39,884	40,246	35,095	35,304
7.	Danurejan	6,672	6,719	31,275	31,602	16,595	16,806	14,680	14,796
8.	Pakualaman	2,769	2,830	14,903	15,509	7,274	7,363	7,629	7,696
9.	Gondomanan	3,611	3,628	17,657	17,877	8,686	8,807	8,971	9,070
10.	Ngampilan	4,805	4,819	23,530	23,773	11,774	11,905	11,756	11,868
11.	Wirobrajan	6,877	6,942	30,920	31,327	15,703	15,857	15,217	15,470
12.	Gd tengen	6,395	6,176	26,761	26,757	13,394	13,397	13,367	13,360
13.	Jetis	6,211	8,040	37,732	38,098	19,534	19,707	18,198	18,391
14.	Tegalrejo	8,399	8,401	40,957	41,481	20,904	21,146	20,053	20,335
	Jumlah	105,327	107,687	514,472	520,608	264,001	267,286	250,471	253,322

Sumber Data : BPS Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel dari penduduk menurut Rumah Tangga diatas, jumlah rumah tangga terpadat ada di kecamatan Umbulharjo, yaitu pada tahun 2004 16.277 rumah tangga, tahun 2005 rumah tangga terpadat masih ada di kecamatan Umbulharjo yaitu 16.639 rumah tangga. Sementara kepadatan terkecil ada dikecamatan Pakualaman yaitu pada tahun 2004 sekitar 2.769 rumah tangga, tahun 2005 juga masih di kecamatan Pakualaman 2.830 rumah tangga. Sedangkan dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kota Yogyakarta secara keseluruhan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu perbandingannya sebesar tahun 2004 adalah 264.001 jiwa, tahun 2005 adalah 267.286 jiwa untuk jumlah laki-laki. Sedangkan jumlah perempuan tahun 2004 adalah 250.471 jiwa, tahun 2005 adalah 253.322 jiwa. Apabila dirinci per kecamatan, maka terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki terbesar tahun 2004 dan 2005 terdapat pada kecamatan Gondokusuman, pada tahun 2004 sekitar 39.884 jiwa , pada tahun 2005 sekitar 40,246 jiwa. Sedangkan perempuan terbesar tahun 2004 ada di kecamatan Gondokusuman, yaitu sekitar 35.095 jiwa dan pada tahun 2005 ada di kecamatan Umbulharjo yaitu sekitar 35.599 jiwa. Dan jumlah penduduk terkecil ada di kecamatan Pakualaman yaitu pada tahun 2004 sekitar 14.903 jiwa dan tahun 2005 tetap di kecamatan Pakualaman yaitu sekitar 15.509 jiwa. Untuk keseluruhan jumlah penduduk di kota Yogyakarta hingga tahun 2004 dan tahun 2005 adalah berjumlah 514.472 dan 520.608 jiwa.

Setelah kita mengetahui segala aspek mengenai kependudukan Kota Yogyakarta, maka hal ini yang harus kita ketahui adalah struktur penduduk Kota Yogyakarta seperti tertuang pada gambar dibawah ini :

STRUKTUR PENDUDUK KOTA YOGYAKARTA



Sumber Gambar : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Dari gambar diatas maka tampak jelas mengenai struktur penduduk Kota Yogyakarta yang dijabarkan melalui kriteria-kriteria tertentu sebagaimana telah diterangkan dibagian sebelumnya. Ada satu hal penting yang dapat disimpulkan dari struktur penduduk Kota Yogyakarta, yaitu bahwa angkatan kerja adalah penduduk yang termasuk dalam usia produktif tetapi sering mengalami hambatan dalam memperoleh pekerjaan.

B. GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA

Pada bagian ini saya selaku penulis akan memaparkan gambaran umum mengenai kondisi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Adapun pemaparan mengenai hal tersebut dapat dilihat seperti dibawah ini :

B.1 Sejarah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada awalnya bernama Departemen Tenaga Kerja. Adapun sejarah Departemen Tenaga Kerja tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa dan tatanan politik yang berkembang sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sejak dari pemerintah Republik Indonesia berdiri hingga sekarang ini, nama kementrian atau departemen yang diserahi tugas untuk menangani masalah ketenagakerjaan berulang kali mengalami perubahan, baik berupa pembentukan baru, penyesuaian maupun penggabungan perubahan organisasi tersebut disebabkan oleh perkembangannya beban kerja yang harus ditangani.

Dalam periode perang kemerdekaan yaitu masa Kabinet Presidentil, masalah perburuhan di bawah dan ditangani oleh Kementrian Sosial. Keadaan ini berlanjut sampai masa Kabinet Syahrir III. Penggantian kabinet-kabinet yang berulang kali, serta lahirnya partai-partai politik yang mewarnai gerakan buruh menjadikan penanganan masalah perburuhan semakin pelik apalagi disertai oleh memburuknya keadaan ekonomi dan dalam keadaan perang.

Maklumat Presiden Nomor 7 Tahun 1947 yang diumumkan tanggal 3 Juli 1947 mengenai Susunan Kabinet Amir Syarifudin, telah dilantik Menteri Perburuhan. Namun Menteri Perburuhan belum dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya sebab ada ketetapan mengenai apa yang menjadi tugas pokoknya. Dengan dikeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tanggal 25 Juli 1947 eksistensi dari tugas Pokok Kementrian Perburuhan mulai berfungsi setelah adanya pelimpahan Organisasi Jawatan Perburuhan, personil dan mata anggarannya. Oleh karena itu tanggal " 25 Juli " berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-888/MEN 1000 ditetapkan sebagai hari jadi Departemen Tenaga Kerja.

Setelah Kabinet Amir Syarifudin jatuh dan diganti oleh Kabinet Hatta tugas pokok dari Kementrian Perburuhan mencakup pula urusan-urusan sosial, sehingga nama dari Kementrian Perburuhan berubah menjadi Kementrian Perburuhan dan Sosial.

Pada masa Kabinet Hatta terjadi peristiwa clash II yang diikuti dengan dibentuknya suatu Kabinet Darurat, yang mana Kementrian Perburuhan dan Urusan Sosial diperlukan tugas dan fungsinya sehingga menjadi Kementrian,

Sosial, Pembangunan, Pemuda serta Keamanan. Periode perang kemerdekaan tercatat sebanyak 8 orang Menteri yang pernah memimpin Kementrian Perburuhan untuk 11 kali masa kabinet, diantaranya 4 Menteri itu adalah Menteri Sosial dalam 4 kali masa bakti kabinet (keadaan sebelum dibentuk Kementrian Perburuhan).

Periode Demokrasi Liberal, Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), organisasi Kementrian Perburuhan tidak lagi mencakup urusan sosial. Pada masa RIS negara Kesatuan Republik Indonesia di Yogyakarta merupakan negara bagian dari RIS sehingga pada masa itu ada Menteri Perburuhan RIS dan Menteri Perburuhan di Yogyakarta. Setelah RIS bubar struktur organisasi Kementrian Perburuhan nampak lebih lengkap karena mencakup struktur organisasi tingkat pusat sampai tingkat daerah dan resort dengan uraian tugas dengan jelas. Di tingkat pusat organisasi Kementrian Perburuhan terdiri dari dua Direktorat yaitu Direktorat Hubungan dan Pengawasan Perburuhan serta Direktorat Tenaga Kerja (PMP 79 tahun 1954). Dalam periode Demokrasi Liberal tercatat 8 orang Menteri Perburuhan dalam jangka waktu 10 kali masa kabinet, termasuk Menteri Perburuhan Pemerintah RIS.

Periode Demokrasi Terpimpin, dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah membuka babak baru dalam tata kehidupan kenegaraan. Pada awal dari Demokrasi Terpimpin, Menteri Perburuhan berada dalam naungan Menteri Inti Bidang Produksi serta dipimpin oleh seorang Menteri Muda Perburuhan. Dalam periode ini juga kehidupan kenegaraan diwarnai oleh kehidupan partai politik yang terpusat dalam pola Nasakom. Dengan pola Nasakom tersebut

memberi angin PKI untuk bergerak dan berupaya mendominasi segala posisi dalam organisasi pemerintah yang ada sebagai salah satu dampaknya adalah kuatnya pengaruh PKI dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Menteri Perburuhan.

Pada akhir Demokrasi Terpimpin terjadi pembubaran PKI dan seluruh organisasi berafiliasi dengannya, sebagai tindak lanjut penerbitan dan juga pengamanan akibat pemberontakan G30S/PKI. Dan mulai dari babak baru yang ditandai oleh adanya upaya-upaya untuk menyelenggarakan tata kehidupan kenegaraan yang bersifat konstitusional, yang merupakan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen. Selama periode Demokrasi Terpimpin tercatat terjadi 6 (enam) kali pergantian Kabinet, namun untuk jabatan Menteri Perburuhan terjadi 2 (dua) kali saja.

Periode Oede Baru merupakan masa transisi dari seluruh organisasi pemerintah dilakukan penertiban dan pembersihan. Sejalan dengan itu terjadi perubahan nama organisasi dari Kementrian Perburuhan menjadi Departemen Tenaga Kerja. Struktur organisasi Departemen Tenaga Kerja berdasarkan pada Keputusan Menteri Presidium Kabinet Ampera Nomor 75/U/Kep/II/1996 mengalami penyempurnaan termasuk Departemen Tenaga Kerja yang diatur pembersihan aparatur pemerintah dari unsur yang terlibat G30S/PKI tercatat 3 (tiga) kali pergantian kabinet.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 organisasi Departemen Tenaga Kerja, berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dengan struktur organisasinya diatur dalam suatu

Keputusan Menteri Nakertranskop Nomor KEP-1000/Men/1975. Dalam perkembangannya organisasi Departemen Nakertranskop mengalami perubahan dengan dipindahkannya urusan koperasi ke Departemen Perdagangan kemudian disempurnakan kembali setelah masalah urusan transmigrasi dilimpahkan ke Departemen Transmigrasi.

Penyempurnaan perihal organisasi tersebut bersifat menyeluruh dari yang semula menganut pendekatan "*holding company type*" beralih ke pendekatan "*integrated type*", struktur organisasi yang baru diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-199/Men/1984 yang mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984. Struktur organisasi ini kemudian disempurnakan lagi khususnya yang menyangkut organisasi tingkat Kantor Pusat yang selanjutnya tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-525/Men/1988 yang mengacu kepada Keppres Nomor 30 Tahun 1987 dan masa Kabinet Pembangunan VI struktur organisasi diatur di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-28/Men/1994 yang mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1993.

Kabinet Pembangunan VI merupakan awal pembangunan jangka panjang II merupakan Kebangkitan Nasional II. Organisasi Departemen Transmigrasi bertambah 2 (dua) Unit Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Binlattas dan Badan Perencanaan Organisasi tersebut disebabkan oleh berkembangnya beban kerja sehingga pada Pelita VI telah merumuskan suatu kebijaksanaan SAPTA KARYA TAMA DEPNAKER dan sekarang menjadi DASA KARYA TAMA.

Departemen Tenaga Kerja disaat Otonomi Daerah bergulir berubah nama menjadi Depaetemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu kita cermati juga, karena untuk saat ini fungsi dan perannannya tampak mulai menurun dikarenakan di daerah sudah dibentuk dians yang menangani masalah ketenagakerjaan bahkan sekarang ini digabungkan dengan penanganan masalah transmigrasi pula. Kondisi tersebut dapat dilihat secara jelas di Kota Yogyakarta dimana Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Lembaran Daerah Nomor 8 Seri D yang mengatur mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Setelah mengetahui sejarah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta maka untuk tahap berikutnya maka kita pun harus mengetahui tujuan didirikan instansi di atas dapat dilihat seperti di bawah ini :

B.2 Tujuan Didirikan

Tujuan didirikan kantor tersebut diatas pada dasarnya yaitu dalam rangka membantu tugas Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Yogyakarta dalam menjalankan pembangunan khususnya sebagai lembaga yang mengelola dan memfasilitasi bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kota Yogyakarta seiring pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999.

Saya selaku penulis berusaha juga memaparkan mengenai Kedudukan Tugas dan Fungsi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Adapun pemaparan tersebut sebagai berikut :

B.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

B.3.a. Kedudukan (pasal 3 ayat 1-3)

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta pelaksana tugas-tugas pembantuan.

Tugas pembantuan adalah :

“ Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan seluruh pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan “.

- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

B.3.b. Tugas (pasal 4)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi khususnya di Kota Yogyakarta.

B.3.c. Fungsi (pasal 5 poin a-e)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi yaitu :

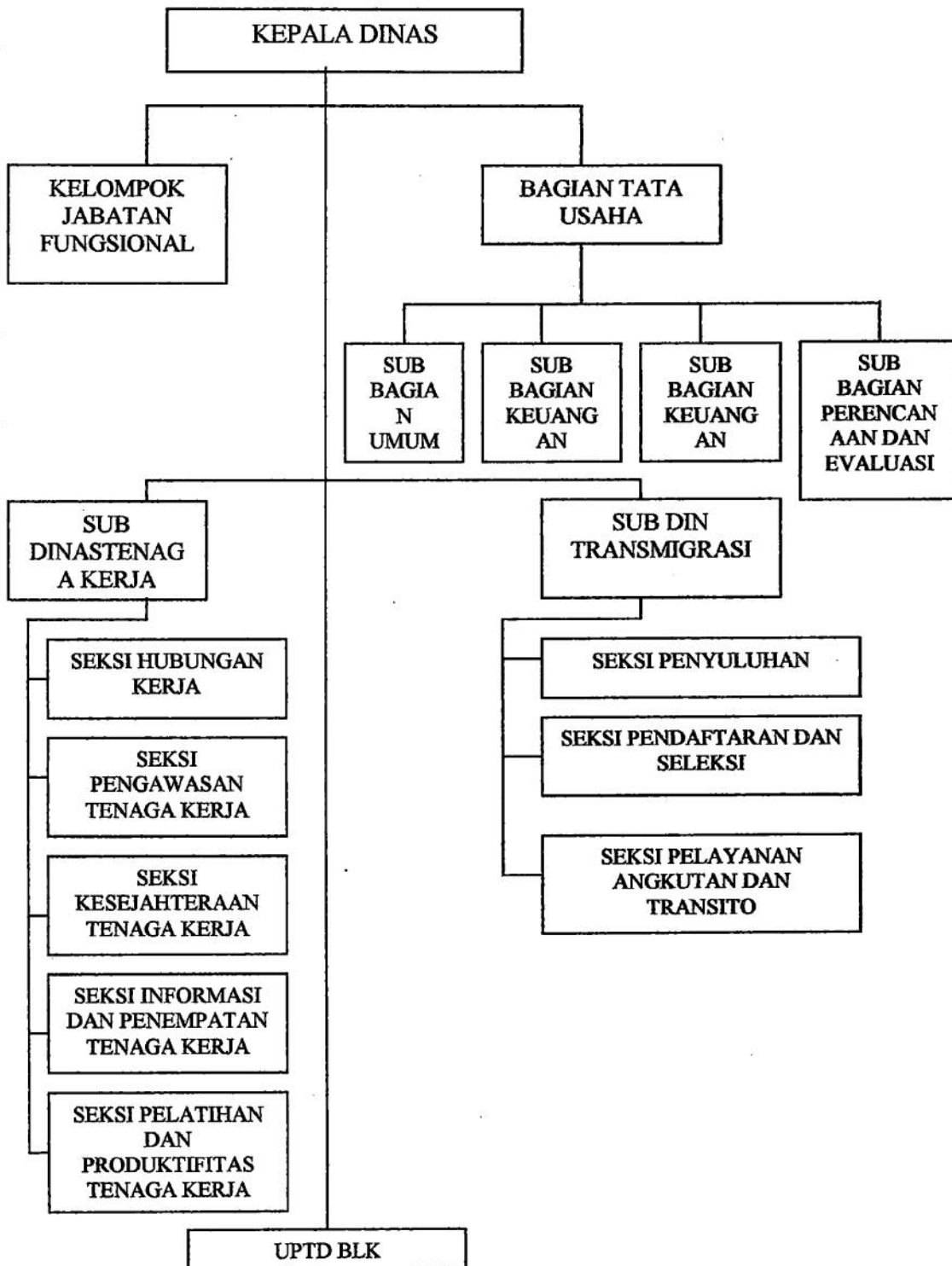
- (1) Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pembangunan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- (2) Pelaksanaan pembinaan atau bimbingan pengganguran, usaha penempatan dan perluasan tenaga kerja serta transmigrasi;
- (3) Pelaksanaan pemberian dan pembatalan izin di bidang ketenagakerjaan;
- (4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- (5) Pelaksanaan ketatausahaan dinas.

Penjabaran diatas terdapat pada Perda Nomor 20 Tahun 2000 LN No 8 seri D.

Untuk tahap berikutnya disini saya pun menampilkan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dapat dilihat seperti di bawah ini :

B.4. Susunan Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Bersumber dari bagan di atas mengenai susunan organisasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta maka disinipun akan saya tampilkan mengenai struktur personalia yang termasuk di dalam susunan organisasi dari dinas tersebut secara lengkap yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas : Sugiman , SH
2. Bagian Tata Usaha Umum : Musa Umar, SH
 - 2.a. Sub Bagian Umum
 - * Ka. Sub. Bagian : Drs. FX. Bambang Y.P.
 - * Staf :
 1. YMG. Separtini
 2. Indah Wirawati
 3. Nurchayatun
 4. Saridi
 5. Tugiono
 6. Subono
 7. Ida Lastriningsih
 8. Tukina
 - 2.b. Sub Bagian Kepegawaian
 - * Ka. Sub. Bagian : Dra. Sri Sudaryati
 - * Staf :
 1. Wahman
 2. Erstiwati
 3. Eni S
 4. Slamet S

5. Sri M

2.c. Sub Bagian Keuangan

* Ka. Sub. Bagian : Sumono, SE

* Staf : 1. Suhartini

2. Suratinah

3. Trinian H

4. Ristiyatie

5. Dwi U.N

2.d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

* Ka. Sub. Bagian : Dra. Endang Pudjawati

* Staf : 1. Sukiyat N. BSc

2. Hari Widitomo

3. Sujanto

4. Budiantara

5. Suyoto

3. Sub Dinas Tenaga Kerja

3.a. Seksi Hubungan Kerja

* Kepala Seksi : Drs. Agus Santoso

* Staf : 1. Asror H, SH

2. Niken S, SH

3. Drs. Hari T

4. Dwiyono, SH

5. R. Irawantono, SH

6. Triharsi Dyah P

7. Sugeng Raharjo

3.b. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja

* Kepala Seksi : Marsudi, SH

* Staf : 1. Djati P, SH
2. Nieke K, SH
3. Ir. Suharni
4. Puryanto, SH
5. Rochidin
6. Budiharta C, BE
7. Sudari
8. Bambang H, Bsc
9. R. Pinten R
10. Mardi
11. Haryadi
12. Wahyono
13. Yulianti W
14. Sukirno

3.c. Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja

* Kepala Seksi : Wahyu Widayati, SH

* Staf : 1. Sumarlan

3.d. Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja

* Kepala Seksi : Didik Murjoko, SH

- * Staf : 1. Bambang S, BA
2. Moch Kanan, Bsc
3. AW. Rustiyanto
4. Sri Hartati, SE
5. Giyanto
6. Dwiwati
7. Achmad M

3.e. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

- * Kepala Seksi : Dra Mardiyati
* Staf : 1. Dra. Rudia Sri R
2. Semiyanto

4. Sub Dinas Transmigrasi

4.a. Seksi Penyuluhan

- * Kepala Seksi : Ir. B. Tuti Budiyarsih
* Staf : 1. Ir. H Prihantati
2. S. Tri Edyningsih
3. Supiyatun, BA
4. Maryuni

4.b. Seksi Pendaftaran dan Seleksi

- * Kepala Seksi : Gentur Suprpto
* Staf : 1. Dra. Tri Astuti A
2. Sidik Harsono, Bsc
3. Waluyo Djati, Bsc

4.c. Seksi Pelayanan Angkutan dan Transito

- * Kepala Seksi : S. Haryadi, SH
- * Staf : 1. Wahyu Sasmita
- 2. Dulhadi
- 3. Sumardi

Susunan organisasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta di atas merupakan susunan yang tersusun saat ini dalam arti susunan tersebut dapat berubah kapanpun misalnya adanya mutasi pegawai atau pegawai yang pensiun, dan sebagainya sehingga susunan tersebut juga sangat di pengaruhi oleh keputusan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemda Kota Yogyakarta.

Adapun Keterangan dari bagan dan nama personil struktur organisasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tersebut di atas, bila dijelaskan adalah sebagai berikut :

B.4.a Organisasi (Pasal 6)

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub bagian – Sub bagian
- c. Unsur Pelaksana : 1. Sub Dinas-Sub Dinas yang masing-masing terdiri dari seksi-seksi

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD)

3. Kelompok Jabatan Fungsional

B.4.b Susunan Organisasi (Pasal 7-24)

B.4.b.1. Kepala Dinas (Pasal 3 ayat 1-3)

Seorang yang memimipin di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas bersama stafnya menjalankan tugas pembantuan dan penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan seluruh pelaksanaannya serta mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

B.4.b.2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari (pasal 8-12) :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan
- d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Penjelasan :

Bagian Tata Usaha

1. Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas (pasal 8)
2. Tugas dari bagian ini adalah mengurus dan melaksanakan segala kegiatan dibidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas (Pasal 9)
3. Bagian dari Tata Usaha mempunyai fungsi penyelenggara urusan umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan, keuangan serta penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi (pasal 10)
 - a) Sub Bagian Umum (pasal 12 ayat 1)

Tugasnya yaitu melaksanakan melaksanakan urusan kearsipan, kehumasan, tata laksana perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta menyiapkan bahan perundang
 - b) Sub Bagian Kepegawaian (pasal 12 ayat 2)

Tugasnya adalah melaksanakan urusan administrasi kepegawaian
 - c) Sub Bagian Keuangan (pasal 12 ayat 3)

Tugasnya adalah melaksanakan urusan administrasi keuangan, verifikasi, pendapatan, pembukuan dan penghitungan anggaran dinas

- d) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi (pasal 12 ayat 4)

Tugasnya adalah melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan dinas, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

Masing-masing sub bagian di atas di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

B.4.b.3. Sub Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari (pasal 13-17) :

- a. Seksi Hubungan Kerja
- b. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja
- c. Seksi kesejahteraan Tenaga Kerja
- d. Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja
- e. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

Adapun penjelasan tersebut di atas dapat dilihat sebagai berikut :

Sub Dinas Tenaga Kerja

1. Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas (pasal 13)
2. Tugas dari bagian adalah melaksanakan urusan dibidang ketenagakerjaan serta melaksanakan tugas tugas lain di berikan Kepala Dinas (pasal 14)
3. Sub Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi perencanaan, pembinaan, hubungan kerja, pemberian atau pembatalan perizinan, pengawasan tenaga kerja, kesejahteraan tenaga kerja, informasi dan penyaluran tenaga kerja serta pelatihan pelatihan produktifitas tenaga kerja (pasal 15)
 - a. Seksi Hubungan Kerja (pasal 17 ayat 1)

Tugasnya adalah menyiapkan bahan bimbingan hubungan kerja kesejahteraan pekerja dan persyaratan kerja.
 - b. Seksi Pengawasan Kerja (pasal 17 ayat 2)

Tugasnya adalah melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan.
 - c. Seksi Kesejahteraan Kerja (pasal 17 ayat 3)

Tugasnya adalah menyiapkan bahan pembinaan jaminan sosial tenaga kerja, menghimpun dan

mengelola data sebagai penetapan kebijakan pengupahan.

d. Seksi Informasi dan Penempatan kerja (pasal 17 ayat 4)

Tugasnya adalah menyiapkan bahan penyebarluasan informasi tenaga kerja dan penempatan atau penyaluran tenaga kerja.

e. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja (pasal 17 ayat 5)

Tugasnya adalah menyiapkan pelatihan lembaga pelatihan dan produktifitas tenaga kerja.

Masing-masing Seksi tersebut diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara kepada Kepala Sub Dinas Tenaga Kerja.

B.4.b.4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (pasal 18-22) :

- a. Seksi Penyuluhan
- b. Seksi Pendaftaran dan Seleksi
- c. Seksi Pelayanan dan Transito

Penjelasan :

Sub Dinas Transmigrasi

1. Dipimpin oleh Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas (pasal 18)
2. Tugas dari bagian ini adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan transmigrasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas (pasal 19)
3. Sub Dinas Transmigrasi mempunyai fungsi penyusunan rencana, program, laporan, evaluasi, pembinaan masyarakat dan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi serta pengurusan transito (pasal 20)
 - a. Seksi Penyuluhan (pasal 22 ayat 1)

Tugasnya adalah menyiapkan data atau investarisasi potensi, sasaran penyuluhan, rencana kerja, motivasi dan evaluasi, meningkatkan mutu penyuluhan, pembinaan masyarakat dan tenaga penyuluh.
 - b. Seksi Pendaftaran dan Seleksi (pasal 22 ayat 2)

Tugasnya adalah menyiapkan urusan pendaftaran, seleksi, pembinaan dan daftar nominatif calon transmigran.
 - c. Seksi Pelayanan Angkutan dan Transito

(pasal 22 ayat 2)

Tugasnya adalah menyiapkan bahan rencana lokasi, kebutuhan, sarana penunjang, sarana angkutan, penampungan, dan pengurusan transito.

Masing-masing seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B.4.b.5. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari (pasal 23-24)

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK)

Penjelasan :

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

1. Dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas (pasal 23 ayat 2).
2. Tugas dari UPTD BLK yaitu melaksanakan dari tugas Dinas dalam bidang pemberian latihan serta ketrampilan kerja kepada masyarakat (pasal 23 ayat 3)

B.4.b.6. Kelompok Jabatan Fungsional (pasal 24)

1. Tugas dari Jabatan Fungsional adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian and kebutuhan (pasal 24 ayat 1).

2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya (pasal 24 ayat 2).
3. Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja setelah diajukan oleh Dinas kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam hal ini Walikota (pasal 24 ayat 3)
4. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tepatnya Surat Keputusan dari Walikota 9pasal 25 ayat 4)
5. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh Seorang Pemangku Jabatan Fungsional Senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas (pasal 24 ayat 5).
6. Syarat untuk masuk menjadi Kelompok Jabatan Fungsional, mereka harus mengikuti diklat pendidikan pengawasan selama 8 bulan serta 2 bulan mengikuti penyelidikan ketenagakerjaan dalam rangka memahami kepengawasan terhadap pelaksanaan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan.

B.5. Tata Kerja

- a. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing (pasal 25)
- b. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas (pasal 26)
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu (pasal 27)
- d. Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Kepala Dinas, Walikota menunjuk pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (pasal 28) Mekanisme hal di atas

dengan cara walikota mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas.

B.6. Kepegawaian

Didalam suatu instansi apapun pasti mempunyai aparatur atau pegawai yang mendukung kelancaran dari suatu program yang dilaksanakan atau dijalankan. Hal ini juga terdapat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Adapun untuk kepegawaian ini dapat digolongkan berdasar jenis kelamin, pangkat atau golongan, tingkat pendidikan dan berdasarkan pejabat fungsional ketenagakerjaan (pasal 29)

Adapun kondisi riil dari kepegawaian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menurut Kriteria tertentu adalah sebagai berikut :

B.6.a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta aparat yang didasarkan pada jenis kelamin lebih banyak didominasi oleh kalangan laki-laki. Hal ini dikarenakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta lebih berorientasi pada petugas-petugas lapangan, dimana dimungkinkan jika melakukan penyuluhan-penyuluhan mungkin akan lebih efektif jika aparat yang mereka utamakan adalah aparat laki-laki, tetapi dilain pihak juga tidak menutup kemungkinan aparat wanita. Adapun berdasar jenis kelamin dapat kita lihat pada tabel Berikut ini :

Tabel 2.5
Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
Berdasarkan Jenis Kelamin

PEGAWAI		JUMLAH
PRIA	WANITA	
45	24	69

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta 2004-2005

B.6.b. Berdasarkan Pangkat Golongan

Adapun untuk pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta kepangkatan paling tinggi adalah sebagai berikut, pangkat/golongan paling tinggi adalah Pembina (IV/a) dan pangkat/golongan paling rendah yaitu juru (I/c). Adapun klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.6**Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
Berdasarkan Kepangkatan/Golongan**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Pembina Tingkat I	IV/a	4
2.	Pembina	IV/b	3
3.	Penata Tingkat I	III/d	20
4.	Penata	III/c	5
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	24
6.	Penata Muda	III/a	7
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	1
8.	Pengatur	II/c	1
9.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1
10.	Pengatur Muda	II/a	3
11.	Juru Tingkat	I/d	-
	Juru	I/c	-
	Jumlah		69

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta 2004-2005

B.6.c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sudah memenuhi syarat pendidikan. Tetapi dilain sisi hal ini menjadikan bahan masukan serta pekerjaan rumah bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk lebih meningkatkan tingkat pendidikan pegawainya

dengan mungkin menyetarakan ijazah/memberikan kesempatan kepada pegawainya yang memiliki Sumber Daya ataupun potensi yang bagus. Adapun untuk tingkat pendidikan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta 2004-2005 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	3
2.	SLTP/Sederajat	2
3.	SLTA/Sederajat	26
4.	D III	7
5.	Sarjana (S 1)	25
6.	Pasca Sarjana	6
Jumlah		69

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta 2004-2005

B.6.d. Berdasarkan Jumlah Pegawai Pejabat Fungsional Ketenagakerjaan

Adapun Jumlah pegawai pejabat fungsional ketenagakerjaan berjumlah 13 orang. Kondisi pegawai ini tersebut di atas masih berlaku hingga saat ini dimana kondisi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan atau beban kerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menangani masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi yang apabila dilihat dari tahun ke tahun semakin kompleks.